

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh :

Ahmad Fajar Tanjung¹.

NIM. E1052191025

Dedi Kusnadi², Herri Junius Nge²

surel: fajartanjung@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi KPU Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi KPU Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2018 dengan mengkaji indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu formulasi jangka Panjang yaitu membahas tentang upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan perencanaan peningkatan partisipasi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, pemilihan Tindakan yaitu Tindakan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya adalah dengan melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat, memasang baliho pemilu, sosialisasi bakal calon yang akan dipilih, memasang spanduk, menyebarkan flyer, dan lainnya, serta alokasi sumber daya yaitu tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh panitia pelaksana pilkada. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pilkada tahun 2018 terdapat kenaikan jumlah partisipasi masyarakat sebesar 71,12% dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 408,083. Kenaikan jumlah ini tentu adanya dukungan dari

pemerintah kabupaten itu sendiri dalam penyelenggaraan pilkada. Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya juga telah memahami pentingnya berpartisipasi dalam pilkada, hal ini juga di sebabkan berhasilnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara pilkada di Kabupaten Kubu Raya.

Kata kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partisipasi, Masyarakat dan Pendidikan Politik.

ABSTRACT

This study aims to describe the strategies of the Kubu Raya Regency General Elections Commission in order to increase community political participation in the Regional Head Election and to analyze the obstacles faced by the Kubu Raya Regency General Elections Commission in increasing community participation in the 2018 Regional Head Election. This study used descriptive research with a qualitative approach namely a data collection method described in words reported by the informants in accordance with the research. The focus of this research is the strategies used by the Kubu Raya General Elections Commission in increasing community participation in the 2018 regional heard election by examining strategy indicators according to Chandler (in Salusu 2015: 64). The data were collected using the methods of interview, observation, and documentation. The results of this study showed that there were 3 (three) strategies in increasing community participation, namely the long-term formulation, namely discussing the efforts made by the General Elections Commission of Kubu Raya Regency in carrying out planning to increase participation; the selection of actions, namely political actions carried out by the General Elections Commission of Kubu Raya Regency in the form of political education to the community; putting up election billboards, socializing the candidates to be elected, putting up banners, distributing flayers, etc., as well as allocating resources, which is carrying out activities that provide understanding and knowledge to all the committees that hold the election activities. The results of this study showed that in the 2018 regional head elections there was an increase in the number of community participation by 71.12% with a fixed number of voters of 408,083. The increase in this number was in part due to the support from the Regency Government itself in the holding of regional head elections. The people in Kubu Raya Regency have also understood the importance of participating in the regional head elections. It was also due to the success of the socialization carried out by the organizers of the regional head elections in Kubu Raya Regency.

Keywords: Strategy, General Elections Commission (KPU), Participation, Community and Political Education.

A. Pendahuluan

Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan, di mana pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Indonesia termasuk dalam kategori negara demokratis karena menerapkan prinsip tersebut dalam sistem pemerintahannya. Dalam tatanan demokrasi, rakyat memiliki hak mendasar untuk memperoleh kesejahteraan dan memiliki posisi yang sangat strategis, sebab kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Artinya, rakyat memegang peranan utama dalam menentukan arah dan pola penyelenggaraan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Pengelolaan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan yang menjadi dasar legitimasi tertinggi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dipandang sebagai perwujudan hak asasi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan.

Indonesia menjadi negara yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi maka negara Indonesia menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi sebagai pembentuk sistem kekuasaan negara yang

berlandaskan kedaulatan rakyat. Kinerja komisi pemilihan umum (KPU) dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang independen dan non-partisipasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan umum di Indonesia, mencakup pemilihan presiden (pilpres), legislatif (pileg), gubernur (pilgub), serta kepala daerah (pilkada). Seluruh proses dan tahapan yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara yang bersifat independen, bukan lembaga lainnya. Sebagai institusi yang bersifat **nasional, tetap, dan mandiri**, keberadaan KPU diatur secara tegas dalam **Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945**, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan tersebut diperjelas dalam **Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum**, yang menegaskan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Komisi

Pemilihan Umum, baik di tingkat pusat maupun kabupaten/kota, memiliki sejumlah tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab utama lembaga ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum.

Pertama, KPU bertugas **merancang, memimpin, dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pemilu** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, KPU memiliki kewenangan untuk **membentuk, membina, dan mengoordinasikan organisasi penyelenggara pemilu** di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) guna menjamin keterpaduan pelaksanaan di seluruh wilayah.

Ketiga, KPU berwenang **menyusun serta menetapkan tata cara dan tata laksana teknis penyelenggaraan pemilu** sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keempat, KPU bertanggung jawab **merencanakan, mengoordinasikan, serta mengawasi pengadaan dan distribusi logistik pemilu** agar seluruh kebutuhan pemungutan suara terpenuhi secara tepat waktu dan transparan. Kelima, KPU juga memiliki peran penting dalam **menghimpun, mengelola, menganalisis, dan memublikasikan data**

serta hasil pemilu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas lembaga penyelenggara.

Rintisan Pemilu di Kabupaten Kubu Raya secara langsung di Tahun 2008 diikuti oleh 215.076 ribu orang dan ditahun 2013 di ikuti 255.801 ribu orang (KPU Kubu Raya). Data tersebut cukup menjadi bukti bahwa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya ini memiliki keinginan terhadap perwujudan demokrasi. Padahal sebelumnya, sudah mampu mengimajinasikan bahwa pemilihan langsung akan terselenggara secara aman dan demokrasi meskipun berpotensi terjadinya gesekan kepentingan yang begitu tinggi dan majemuk.

Tabel 1.1

Jumlah Pemilih dalam Pilkada tahun 2008, 2013, dan 2018

No	Tahun	Jumlah Pemilih Tetap	Pemilih yang Berpartisipasi	Persentase
1	2008	345.987	215.076	61 %
2	2013	395.577	255.801	65,5 %
3	2018	408.083	290.237	71, 12 %

Sumber: komisi pemilihan umum kabupaten Kubu Raya, tahun 2022

Pada tabel diatas, jumlah pemilih tetap pada tahun 2008 adalah sebanyak 345.987 jiwa dan yang berpartisipasi dalam

pilkada pada tahun tersebut adalah sebanyak 215.076 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah pemilih tetap pada pilkada di Kabupaten Kubu Raya adalah sebanyak 395.577 dan pemilih yang berpartisipasi adalah sebanyak 255.801. sedangkan pada tahun 2018 jumlah pemilih tetap adalah sebanyak 408.083 dan pemilih yang berpartisipasi adalah sebanyak 290.237. dilihat dari ketiga tahun tersebut dari jumlah pemilih tetap hingga jumlah pemilih yang berpartisipasi selalu meningkat, dari hal tersebut tentu dapat kita lihat bahwa setiap pilkada selalu ada peningkatan pemilih yang berpartisipasi. Fenomena ini tentu adanya dukungan dari pemerintah kabupaten itu sendiri dalam penyelenggaraan pilkada. Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya juga telah memahami pentingnya berpartisipasi dalam pilkada, hal ini juga di sebabkan berhasilnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara pilkada di Kabupaten Kubu Raya

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Kstrategi KPU Kubu Raya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada tahun 2018 ?. sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Mendeskripsikan strategi KPU Kabupaten Kubu raya dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada

- b. Menganalisi hambatan-hambatan yang di hadapai oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2018

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis dan perilaku yang dapat diamati dari orang yang di teliti. Studi deskriptif inilah yang akan menjelaskan secara deskriptif tentang strategi komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati kubu raya pada tahun 2018. Penelitian ini di fokuskan pada upaya dan strategi komisi pemilihan umum (KPU) terhadap partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati kubu raya pada tahun 2018. Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan wawancara terhadap komisi pemilihan umum (KPU)

Kubu Raya, penelitian mewawancarai ketua komisioner KPU ketua Divisi sosialisasi terkait upaya dan strategi komunikasi, serta masyarakat yang ada di sekitar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 10 (sepuluh) informan yang dijadikan bahan untuk mendapatkan informasi sehingga dapat menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Berikut adalah daftar informan yang di wawancarai oleh peneliti.

Tabel 3. Daftar Informan

No	Informan	Status Informan
1	Rafika	Anggota KPU bagian analis pemilu
2	Ratno Purwanto	Anggota KPU bagian hukum dan SDM
3	Rajemi	Kasubag Teknis Penyelenggaraan KPU Kubu Raya
4	Hidayatullah	Anggota KPU bagian Humas
5	Muliyadi	Anggota KPU bagian SDM
6	Hendra Amri Rimbun	Kepala Desa Arang limbung
7	Eni Puspawati	Sekretaris Desa Arang Limbung
8	Septiani	Masyarakat Kubu Raya
9	Gustiar	Masyarakat Kubu Raya
10	Hendrayana	Masyarakat Kubu Raya

	Saputra	
--	---------	--

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari perpustakaan. Studi dokumentasi atau dari penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, dokumen dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam animasi data perimer.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Melalui wawancara, peneliti berupaya memperoleh informasi mendalam mengenai kebijakan, pengalaman, serta pandangan para pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

2. Observasi

Metode observasi dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami kondisi dan dinamika yang terjadi selama proses penelitian. Peneliti berinteraksi

secara langsung dengan subjek penelitian dan mencatat berbagai temuan yang relevan di lokasi. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi faktual serta memperkuat hasil wawancara dengan bukti empiris di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti arsip, laporan kegiatan, buku, foto, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi berfungsi sebagai bahan pelengkap dan pembandingan terhadap data hasil wawancara dan observasi, sehingga memperkuat validitas temuan penelitian.

Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**, yaitu dengan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk narasi atau kata-kata. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan data.

Tahap pertama analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari konteks empiris untuk membangun pemahaman

berdasarkan fakta yang ditemukan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian, yakni di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya serta kepada masyarakat yang menjadi pemilih. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk melengkapi informasi yang belum diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih komprehensif.

2. Reduksi data

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan di lapangan. Seluruh catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian ditransformasikan menjadi uraian yang sistematis. Pada proses ini, peneliti merangkum data, memilih informasi yang relevan, serta mengelompokkan hal-hal pokok yang mendukung tujuan penelitian. Dengan demikian, hanya data yang signifikan dan mendukung analisis utama yang dipertahankan.

3. Klasifikasi data

Setelah melalui proses reduksi, data selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, yakni **strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19**. Tahapan ini

bertujuan agar data tersusun secara tematik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna di balik temuan lapangan.

4. Penyajian data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian secara menyeluruh. Pada tahap ini, peneliti membedakan data yang relevan dengan data tambahan, kemudian memberikan batasan permasalahan sesuai dengan fokus kajian. Setelah proses penyajian data selesai, dilakukan penarikan kesimpulan sementara yang terus diuji dan diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung hingga diperoleh hasil akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pembahasan

Pada pelaksanaan **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kubu Raya tahun 2018**, tercatat terdapat **1.230 Tempat Pemungutan Suara (TPS)** yang tersebar di sembilan kecamatan dengan **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** sebanyak **408.083 orang**. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada tahun 2013, yang pada saat itu hanya memiliki **1.140 TPS** dengan **DPT sebanyak 395.577 pemilih** (Sumber: KPU Kabupaten Kubu Raya). Peningkatan jumlah TPS dan DPT ini mencerminkan

adanya perkembangan positif dalam penyelenggaraan pemilu serta menunjukkan hasil nyata dari upaya KPU Kubu Raya dalam memperluas akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat **mandiri, profesional, dan berintegritas**, KPU Kubu Raya berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan yang transparan dan partisipatif sesuai dengan visi kelembagaannya, yakni menjadi penyelenggara pemilu serentak yang kredibel dan terpercaya. Dalam mewujudkan visi tersebut, KPU Kubu Raya menerapkan berbagai **strategi peningkatan partisipasi pemilih**, antara lain melalui kegiatan **sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat**, penguatan **komunikasi publik**, serta peningkatan **kapasitas kelembagaan internal** agar mampu menjangkau pemilih secara lebih efektif.

Hasilnya terlihat jelas pada peningkatan **tingkat partisipasi masyarakat**, yang pada Pilkada tahun 2013 sebesar **65,5%**, naik menjadi **71,12%** pada tahun 2018. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya sistematis KPU dalam menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat Kubu Raya.

Untuk menganalisis strategi tersebut,

penelitian ini mengacu pada konsep strategi yang dikemukakan oleh **Chandler**, yang membagi proses perumusan strategi ke dalam tiga tahap utama, yaitu:

- (1) **formulasi dan penetapan sasaran jangka panjang**,
- (2) **pemilihan tindakan strategis yang tepat**, dan
- (3) **alokasi sumber daya secara efisien**.

Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana KPU Kabupaten Kubu Raya menerapkan ketiga tahapan tersebut dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2018, dengan menelaah langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan di lapangan secara sistematis.

Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2018, **KPU Kabupaten Kubu Raya** merancang strategi yang berfokus pada **peningkatan kesadaran politik masyarakat**, dengan menekankan bahwa partisipasi dalam pemilihan umum merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Formulasi dan sasaran jangka panjang strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat perencanaan KPU dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara berkelanjutan.

Upaya strategis dilakukan melalui tiga tahapan waktu, yaitu **pra-pemilihan**,

hari pelaksanaan pemungutan suara, dan **pasca-pemilihan**. Pada setiap tahap, KPU Kubu Raya menyusun langkah-langkah yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan regulasi yang berlaku. Strategi tersebut juga berlandaskan pada implementasi kebijakan dari pemerintah pusat melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan ketentuan peraturan daerah yang diterjemahkan ke dalam program kerja KPU Kubu Raya.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, KPU Kubu Raya melakukan **sosialisasi langsung kepada berbagai segmen pemilih**, termasuk pemilih pemula, perempuan, kelompok adat, dan masyarakat umum. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi teknis mengenai tata cara pemungutan suara, tetapi juga menekankan pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban politik warga negara.

Seperti dijelaskan oleh **Rajemi**, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kubu Raya:

“Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kubu Raya, kami di KPU secara konsisten melakukan sosialisasi yang berfokus pada pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada, hak dan kewajiban pemilih, serta tata cara pelaksanaan pemilihan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan

bahwa pendekatan komunikasi langsung menjadi salah satu cara efektif bagi KPU untuk memastikan pesan sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Efektivitas implementasi strategi sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi lebih memahami arti penting partisipasi politik, khususnya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, yang hasilnya akan berpengaruh terhadap arah pembangunan dan kemajuan daerah di masa depan.

Selain itu, pelaksanaan strategi ini berpedoman pada landasan hukum yang kuat, yakni:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012** tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2013**, yang merupakan perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

terakhir melalui PKPU Nomor 19 Tahun 2013.

Landasan hukum tersebut menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Kubu Raya dalam merumuskan dan melaksanakan strategi peningkatan partisipasi masyarakat secara sistematis dan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Pemilihan Tindakan

Tindakan strategis merupakan langkah konkret yang dirancang untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Dalam konteks perilaku politik, tindakan ini berkaitan dengan keterlibatan aktor politik dalam membangun kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu politik yang berlangsung. Bentuk tindakan politik dapat diwujudkan melalui interaksi langsung antarindividu, kegiatan organisasi, maupun melalui pemanfaatan media massa, yang keseluruhannya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi seseorang dalam kehidupan politik. Pada penyelenggaraan **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**, tindakan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan para pelaku politik menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat sekaligus menyampaikan tujuan serta pesan demokratis dari setiap proses pemilihan. Bagi **KPU Kabupaten Kubu Raya**, bentuk tindakan politik

tersebut diwujudkan melalui kegiatan **sosialisasi pemilukada**. Sosialisasi pemilukada dilaksanakan sebagai proses penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai **tahapan, jadwal, serta program penyelenggaraan pemilu**, sekaligus membangun hubungan sosial antara penyelenggara dan pemilih. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tata cara pemungutan suara, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Dengan adanya pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kubu Raya menargetkan ke beberapa segmen, yaitu kepada segmen pemilih pemula, perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan oleh Rafika divisi bidang analisis Pemilu mengatakan bahwa :
“dari kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, kami menargetkan beberapa titik utama yang menjadi sasaran sosialisasi kami yaitu diantaranya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi adalah masyarakat umum, kelompok pemilih pemuda, perempuan, serta LSM yang ada di setiap kecamatan”

Selain kegiatan sosialisasi tersebut, KPU Kubu Raya melakukan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat guna menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pilkada, memasang baliho pemilu, mensosialisasi bakal calon yang akan dipilih, memasang spanduk, menyebarkan flyer, membuat famplet, menyebarkan informasi melalui media sosial, termasuk facebook, Instagram, twitter, youtube, dan radio. Rafika juga mengatakan bahwa :

“Untuk Fasilitas yang kami gunakan demi menyebarluaskan proses sosialisasi, kami menggunakan media sosial seperti facebook, web resmi KPU, koran, aplikasi pemilu dan alat lainnya, karena zaman sekarang sudah rata-rata aktif di media sosial, jadi kami tidak melewatkan kesempatan itu untuk menyebarkan informasi terkait sosialisasi yang kami lakukan”

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan yang ada. KPU Kubu Raya juga memberikan doorprize untuk masyarakat yang ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi mengenai pemilihan Bupati dan wakil bupati kubu raya tersebut, hal itu juga yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat lebih menganggap bahwa adanya timbal balik

yang dilakukan oleh masyarakat itu terhadap KPU, maka dari itu masyarakat sangat berantusias untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan pilkada tahun 2018. Tindakan politik yang dilakukan ini juga sebagai sarana referensi perkembangan-perkembangan politik bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan akhirnya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya.

Alokasi Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting yang menentukan sejauh mana individu atau organisasi mampu melaksanakan kegiatan secara efektif untuk mencapai **visi, misi, dan tujuan** yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, **KPU Kabupaten Kubu Raya** berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan kompetensi **panitia penyelenggara pemilu**. Sebagai bentuk implementasi dari strategi tersebut, KPU Kubu Raya melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyelenggara di tingkat kabupaten hingga ke satuan pelaksana di lapangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah **pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek)** yang dirancang untuk memperkuat pemahaman

panitia mengenai seluruh tahapan Pilkada. Melalui kegiatan ini, panitia diharapkan tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam **mensosialisasikan tahapan dan agenda Pilkada** kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia. Upaya ini bertujuan agar informasi terkait pemilu dapat tersampaikan dengan jelas dan mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Program peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada **Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah**, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi tentang tahapan kegiatan pemilihan. Selain itu, peraturan tersebut juga menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga masyarakat tidak menaruh persepsi negatif terhadap integritas penyelenggara. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya tidak hanya berorientasi pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga berperan penting dalam membangun **kepercayaan publik dan citra positif lembaga** melalui

penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kubu Raya tahun 2018

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 yaitu pertama kepatuhan masyarakat kabupaten Kubu Raya terhadap berbagai aturan yang telah diformulasikan baik oleh pemerintah maupun KPU sehingga proses peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, factor lainnya yaitu keaktifan dan profesionalisme dari panitia pilkada serta relawan demokrasi yang merupakan asil dari upaya KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan bimbingan teknis terhadap panitia pelaksana pilkada dan relawan demokrasi. Kedua Pendidikan politik rakyat, memotivasi memilih atau tidak lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal, seperti Pendidikan poliik. Pendidikan politik itu sendiri dilakukan guna memberikan pesan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Melalui proses ini masyarakat lebih mengenal dan mempelajari norma-norma, nilai-nilai dan symbol-simbol politik negaranya dari

berbagai pihak dalam system politik seperti seklah, pemerintah, dan partai politik. Ketiga Memaksimalkan fungsi partai politik, partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya tidak luput dari peran calon pasangan, dimana calon pasangan ini di dukung oleh partai-partai politik yang melakukan program-program untuk mencapai tujuannya. Partai politik itu sendiri berfungsi sebagai sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi masyarakat yang sadar akan hak dn kewajibannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penciptaan suasana yang kondusif juga merupakan hal yang dilakukan oleh parpol untuk kesejahteraan rakyatnya. Tentu hal tersebut di dukung oleh Komisi Pemilihan Umum Kubu Raya sendiri. Factor lain yang memepengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yaitu :

- a. Kesadaran Politik, Tingkat kesadaran politik masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam Pilkada dapat mempengaruhi tingkat partisipasi
- b. Informasi yang Tersedia, Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang calon, visi-misi, dan program kerja dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
- c. Kualitas Calon, Tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh

- kualitas calon yang diusung
- d. Kampanye yang Efektif: Kampanye yang efektif dan menyentuh langsung masyarakat dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi
 - e. Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya juga dapat mempengaruhi partisipasi dalam Pilkada.
 - f. Faktor Sosial dan Budaya: Faktor sosial dan budaya seperti norma, nilai, dan tradisi juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.
 - g. Fasilitas dan Aksesibilitas: Ketersediaan fasilitas pemungutan suara yang memadai dan aksesibilitas yang baik ke tempat pemungutan suara juga dapat meningkatkan partisipasi

D. Simpulan

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di dapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2018 terus meningkat dari tahun sebelumnya. Terdapat 1.230 TPS yang berada di Sembilan kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap sebanyak 408.083. dibandingkan dengan tahun 2013, TPS

yang tersebar di Sembilan kecamatan sebanyak 1.140 TPS dengan daftar pemilih tetap sebanyak 395.577. Jumlah pemilih pada pilkada Kubu Raya tahun 2018 meningkat sebesar 5.62%. Pada tahun 2013 jumlah pemilih tetap sebanyak 395,577 yaitu sebesar 65.5% sedangkan pada tahun 2018 jumlah pemilih yang berpartisipasi sebanyak 408,083 atau sebesar 71.12%.

b. Saran

1. KPU Kubu Raya selalu meningkatkan kinerja yang telah di rancang guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilu tahun berikutnya, sehingga selalu terdapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Dalam melakukan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, KPU harus merancang strategi-strategi baru agar masyarakat tidak jenuh dengan sosialisasi yang disampaikan oleh KPU
3. Untuk masyarakat terutama yang tidak ikut berpartisipasi, seharusnya lebih memahami arti penting berdemokrasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Referensi

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afrizal, *metode penelitian kualitatif: upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014,h,13

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Cangara Hafied H. 2013. *Perencanaan dan Strategi Partisipasi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dwi Haryono. 2018. *Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan*

Hariyono dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang: Setara Press. hlm.23.

Haryono D. 2018. Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *Jurnal Administrative Reform* 6 (2):

H. Hafied Cangara. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 61.

Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara.

Buku:

J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.

Internet (artikel dalam jurnal online):

Gleko, Petrus. 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan UmumKepala Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Rahmat S, Darma. 2020. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Batam*. Jurnal

Sumatera Barat dalam *Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19*. *Jurnal Niara* 14(1): 189.

Riko Riyanda dan Ilham. 2021. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid 19*. Jurnal

Link Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Kubu_Raya_2018

<https://pontianak.tribunnews.com/2017/11/13/tak-maju-pilkada-kubu-raya-rusman-ali-kalahkan-incumbent-di-2013-segini-perolehan-suaranya>

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2008/12/19/19202131/regionalkalimantan>

Riyanda P, dan Ilham. 2021. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi